

Gubernur Jawa Timur Ungkap Dua Wasiat Ibunda Jokowi Sebelum Wafat

Warta Surakarta, Solo – Dilansir dari regionalkompas.com - Ibunda Presiden Joko Widodo, Sujiatmi Notomiharjo, meninggal dunia di RST Slamet Riyadi, Solo, pada Rabu (25/3/2020) pukul 16.45 WIB, akibat penyakit kanker tenggorokan yang dideritanya selama 4 tahun belakangan.

Sejumlah pejabat pemerintah dari pusat maupun daerah terlihat melayat ke kediaman Jokowi di Sumber, Solo tak terkecuali Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Ia mengatakan ke awak media bahwa sewaktu melayat, Khofifah sempat bertanya kepada adik-adik Jokowi terkait pesan wasiat ibunda sebelum wafat.

"Saya tanya apa wasiatnya beliau. Yang pertama adalah beliau sampaikan putra-putri beliau melanjutkan

silaturahmi dengan teman-teman almarhumah. Kemudian yang kedua beliau pesan supaya kalau ada sisa rezeki beliau untuk diwakafkan di masjid," ungkap Khofifah, Kamis (26/3/2020).

Khofifah mengaku sudah mengenal sosok Sujiatmi sejak sebelum Jokowi menjadi presiden. Menurutnya, almarhumah selama hidup sangat taat beribadah. Selain rajin untuk melaksanakan shalat subuh, maghrib, dan isya berjemaah di dalam masjid, almarhumah tak pernah melewatkan



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat melayat Ibunda Jokowi. Dokumentasi: Kompas

pengajian, Khofifah juga menambahkan bahwa selain taat beribadah, Ibunda Jokowi juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka membaaur dengan masyarakat.

(Azalia Sastrika)

Dianggap Tidak Efektif, Joko Sutopo Larang Lockdown Wonogiri

Warta Surakarta, Wonogiri – Dilansir dari suaramerdekasolo.com, untuk mencegah penyebaran Pandemi Covid-19, sejumlah kepala daerah menetapkan *lockdown* regional, tetapi tidak dengan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo yang melarang *lockdown* di setiap kecamatan hingga kampung-kampung.

Menurutnya, keputusan *lockdown* adalah tindakan tidak efektif, dikarenakan yang dihadapi saat ini adalah virus.

"Yang kita hadapi ini bukan binatang buas, tapi virus yang tidak terlihat. Apa kalau jalannya

sudah diportal, terus virusnya nggak bisa menular?" katanya pada Minggu (29/3).

Joko juga menganggap, bila menerapkan *lockdown*, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil, seperti wajib memenuhi segala logistik, kebutuhan pokok masyarakat dan sebagainya.

"Misalnya kalau desa melakukan *lockdown*, pengambil kebijakan harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan, lho. Setiap keputusan itu harus ada tanggung jawabnya.", ujarnya kepada suaramerdekasolo.com

Selain tidak efektif, *lockdown* juga memberi pengaruh pada psikologi masyarakat.

Joko menjelaskan bahwa hal yang paling penting adalah menanamkan pemahaman pencegahan penyakit virus corona (Covid-19), yakin edukasi tentang pembatasan kontak antar

Karantina Wilayah, Bagaimana Penjelasannya?

adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam UU tersebut, kekarantinaan kesehatan dapat dilakukan dengan kebiakan karantina wilayah atau *local lockdown*. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, langkah kebijakan nyatanya belum cukup.

Padahal setidaknya telah ada 1.285 lebih orang telah terinfeksi dan 150 lebih orang meninggal. Sehingga Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana karantina wilayah sangat mendesak untuk ditetapkan, sehingga perlindungan terhadap segenap bangsa menjadi hukum tertinggi, atau dalam term hukum.

Dalam membentuk Peraturan Pemerintah terkait hal ini, khususnya mengenai karantina wilayah, perlu memperhatikan beberapa hal.

Pertama, penetapan karantina wilayah harus mempertimbangkan kondisi wilayah, sehingga dampak dan konsekuensi terhadap karantina wilayah bisa disesuaikan situasi dan

kondisi wilayah tersebut.

Kedua, jaminan terhadap ketahanan kebutuhan dasar harus diperhatikan ketika masa karantina wilayah, pemenuhan kebutuhan dasar adalah hal krusial dikarenakan karantina wilayah melumpuhkan semua sektor, terutama sektorekonomi.

Ketiga, hak-hak kelompok rentan (*vulnerable groups*) seperti wanita, anak-anak, masyarakat adat, lanjut usia, bahkan masyarakat miskin menjadi hal yang lebih diperhatikan.

Keempat, dalam pelaksanaan karantina wilayah, bekerjasama dengan pemerintah daerah, sebagai perwujudan otonomi daerah. (Azalia Sastrika)

Surakarta Darurat Korona, Bawaslu Gunakan IT Untuk Koordinasi Pengawas Pilwa

Warta Surakarta, Solo – Dilansir dari suaramerdekasolo.com - Dalam rangka memaksimalkan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemilihan wali kota Solo, Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta (Bawaslu) sementara waktu menggunakan informasi teknologi (IT).

"Koordinasi dengan Bawaslu Propinsi Jawa Tengah dengan cara Vidcon perdana digelar pada Kamis 19 Maret 2020 diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah," ujar Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono.

Budi menyatakan, penggunaan informasi teknologi juga bakal dilakukannya saat berkoordinasi dengan pengawas tingkat kelurahan dan kecamatan.

Menurutnya, hal ini dilakukan karena Kota Solo masih berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap wabah virus corona.

Pihaknya sedang mempersiapkan startegi pengawasan dan personil dalam verifikasi faktual yang dijadwalkan 26 Maret sampai 15 April.

"Saat ini kami tengah fokus membekali jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan dalam hal pengawasan verifikasi faktual bacaper di Surakarta. Sesuai arahan Bawaslu Jateng maka bentuk pengarahan akan kita laksanakan dengan cara video conference," imbuhnya.

(Azalia Sastrika/Suaramerdeka.com)

manusia (*physical distancing*), pola bersih hidup sehat (PHBS) hingga pembiasaan mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Wonogiri memusatkan posko pemeriksaan awal di Terminal Induk Giri Adipura Wonogiri. Seluruh penumpang angkutan umum diperiksa di terminal tersebut. Posko tersebut dibuka 24 jam dengan lebih dari 200 personel.

Selama darurat Covid-19 sampai Minggu (29/3), jumlah penumpang yang masuk Kabupaten Wonogiri mencapai 21.769 orang sementara yang keluar berjumlah sekitar 13.000 orang.

Selama proses pemindaian, ditemukan 46 orang yang suhu badannya mendekati 38 derajat celsius, kemudian mereka diarahkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

(Azalia Sastrika/Suaramerdeka.com)